





PEMERINTAH KOTA AMBON

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, hanya karena penyertaan-Nya Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Tahun 2023 telah selesai disusun.

Renja ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Kota Ambon selama satu tahun. Dengan harapan agar program-kegiatan-sub kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon lebih terarah dan terukur.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Renja ini demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah serta Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon dalam peningkatan akses bagi masyarakat melalui penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Ambon, Oktober 2023

**Kepala Dinas Komunikasi Informatika
dan Persandian Kota Ambon**

Drs. Joy R. Adriaansz, M.Si

Pembina UtamaMuda
NIP. 19770320 199511 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2	
DAFTAR ISI	3	
BAB I	PENDAHULUAN	4
	.1 Latar Belakang	4
	.2 Landasan Hukum	1
	.3 Maksud dan Tujuan	5
	.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN III	7
	2.1. Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah sampai awal Triwulan III Tahun 2023	7
	2.2. Analisis Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Tahun 2023	17
BAB III	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH	21
	3.1. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	21
	3.2. Rencana Kinerja Perubahan 2023	22
BAB V	PENUTUP	32

BAB I

PENDAHULUAN

.1. Latar Belakang

Bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana kerja Perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, disamping juga berpedoman pada Rencana Strategis, RPJMD dan RPJPD. Perubahan Rencana kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Tahun 2023 disusun berpedoman pada RPJPD Kota Ambon Tahun 2005-2025. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja juga didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023- 2026. Dengan adanya acuan diatas, perubahan rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Perubahan Renja diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Perubahan Kota Ambon Tahun 2023.

.2. Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Ambon Tahun 2006-2026;
- m. Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.
- n. Keputusan Wali Kota Ambon No 496 Tahun 2021 tentang Penetapan Standarisasi Normalisasi Barang dan Harga Kebutuhan Pemerintah Kota Ambon Tahun 2022

.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Tahun 2023 ini adalah :

- 1. Merupakan suatu dokumen perubahan perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam merencanakan perubahan anggaran.
- 2. Merupakan suatu alat untuk mengukur kinerja instansi yang efektif, berkelanjutan
- 3. Merupakan pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilaksanakan.
- 4. Merupakan gambaran terhadap kinerja OPD sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2023

Tabel 2.1

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

Tabel 3.1

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN III

2.1. Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah sampai Triwulan II Tahun 2023

Keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan perlu ditetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD. Indikator kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2023, selain itu juga memperhatikan dokumen Resntra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Sampai dengan awal bulan Triwulan III Juli tahun 2023 penyerapan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika sudah mencapai 50 persen. Hal ini disebabkan karena ada beberapa pekerjaan yang proses pengajuan administrasi pembayarannya pada Triwulan III dan Triwulan IV.

Adapun Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan awal Triwulan III Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah

LA
DINAS KOMUNIKASI IN
KEADAAN TR

No	Program/Kegiatan	LOKASI (KEC/ DESA/ KEL- RT/RW)	TARGET INDIKATOR KINERJA		
			PAGU DANA (RP)	HASIL	VO
1	2	3	4	5	
► DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA AMBON					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Rp 3,960,137,761		

KABUPATEN/KOTA					
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp 11,210,718		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rp 11,210,718	Tersedianya dokumen LAKIP, LKPJ, LPPD, RENJA SKPD	4 [
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp 2,767,824,855		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon)	Kota Ambon	Rp 2,759,468,082	Tersedianya gaji dan tunjangan pegawai dengan anggaran sebesar Rp 2.759.468.082	2 5
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Ambon	Rp 8,356,773	Tersedianya dokumen laporan keuangan SKPD	2 [
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp 549,083,776		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Ambon	Rp 272,434,262	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Ambon	Rp 35,325,764	Tersedianya ATK kantor dan	3 5

				benda pos (meterai)	
	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Ambon	Rp 17,999,750	Tersedianya bahan cetak penggandaan dan penjilidan	
	4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Ambon	Rp 223,324,000	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 0
4	Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah		Rp 484,266,372		
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Ambon	Rp 45,978,000	Tersedianya telepon berlangganan	1
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Ambon	Rp 438,288,372	Terbayarnya gaji kontrak dan honorarium pengadaan barang jasa	2 6
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp 147,752,040		
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Kota Ambon	Rp 132,832,040	Tersedianya pemeliharaan dan pajak mobil dinas	3
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pensukung	Kota Ambon	Rp 14,920,000	Tersedianya pemeliharaan	2

	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			saran prasarana pendukung gedung kantor	
II	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Rp 2,760,563,875		
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp 2,760,563,875		
	1 Pelayanan Informasi Publik	Kota Ambon	Rp 741,677,377	Terlaksananya publikasi kegiatan pemerintah kota ambon	1
	2 Layanan Hubungan Media	Kota Ambon	Rp 1,600,000,000	Terlaksananya layanan kehumasan	1
	3 Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Kota Ambon	Rp 163,886,498	Tersedianya bimtek	1
	4 Penyelenggaraan Hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	Kota Ambon	Rp 255,000,000	Terlaksananya layanan kehumasan	3

III	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Rp 3,887,275,581		
1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota		Rp 2,878,374,408		
	1 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Ambon	Rp 20,224,200	Terlaksananya penatalaksanaan dan pengawasan nama sub domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	1
	2 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Ambon	Rp 2,858,150,208	Jumlah jaringan sistem intra pemerintah	1
2	Pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota		Rp 1,008,901,173		
	1 Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Kota Ambon	Rp 248,521,000	Terkelolanya pusat data pemerintah daerah	1
	2 Penyelenggaraan komunikasi sistem intra pemerintah daerah	Kota Ambon	Rp 295,844,200	Terlaksananya penyelenggara sistem intra pemerintah daerah	1
	3 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Ambon	Rp 37,588,376	Terlaksananya program evaluasi smart city	1
	4 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Ambon	Rp 407,150,997	Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi dan informasi	1

	5	Pengelolaan Government Chief Information Officer	Kota Ambon	Rp 19,796,600	Terlaksanaynya pengelolaan government chief officer	1
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			Rp 50,455,935		
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten/Kota			Rp 50,455,935		
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengelolaan Analisis dan Diseminasi Data	Kota Ambon	Rp 50,455,935	Tersedianya data sektoral di lingkup pemerintah kota ambon	1
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN			Rp 118,276,525		
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah			Rp 118,276,525		
	1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Ambon	Rp 118,276,525	Terlaksananya keamanan elektronik informasi pemerintah daerah kabupaten kota berbasis elektronik	1
	TOTAL			Rp 10,776,709,677		-

2.2 ANALISIS KINERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA AMBON TAHUN 2022

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon dan Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kota pada urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi informatika dan persandian.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon mengacu pada Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika dan persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi informatika dan persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi informatika dan persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, terdiri atas:

- a) Sekretariat;
- b) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- c) Bidang Teknologi Informasi Persandian dan Statistik; dan
- d) Bidang Penyelenggaraan *e-Government*.

Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon adalah pelayanan informasi meliputi Command Center, website, SIMANTAP, kotak informasi, infrastruktur jaringan, pengaduan masyarakat, vidiotron, pajak online dan simdatik.

a. Command Center

Pembangunan *Command Center* merupakan salah satu implementasi program unggulan pada dimensi *smart governance*. Dimana pada fasilitas *command center* terdapat layanan integrasi aplikasi dan layanan 32 Unit CCTV untuk memantau arus lalu lintas, Tempat Pembuangan Sampah (TPS), ketinggian permukaan air sungai pada lokasi 4 sungai besar yang melintas di Kota Ambon serta lokasi area publik. Selain itu, telah dilakukan pemantauan secara terpusat seluruh aplikasi pelayanan public maupun internal pemerintahan. Aplikasi yang diintegrasikan pada command center antaralain : Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kependudukan (SIMAK) simak.zone, Aplikasi Monitoring Pajak Daerah (Tapping.ambon.go.id), Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SIMANTAP)

Simantaponline.ambon.go.id, LayananLapor SP4N (lapor.go.id), Dasboar Veneu Owner (Veneu.wifi.id) serta Sistem Informasi Data StatistikSektoral (SIMDATIK) Simdatik.ambon.go.id.

b. Pelayanan melalui Website

Informasi merupakan hal yang penting sekarang ini dan informasi dapat didapat melalui surat kabar maupun internet dengan kemajuan teknologi maka informasi sekarang ini banyak ditampilkan lewat internet, untuk itu Pemerintah Kota Ambon menyediakan informasi melalui website, informasi yang dimuat dalam website meliputi berita-berita kegiatan Pemerintah Kota Ambon, ekonomi, industri, pariwisata, iklim dan cuaca dengan informasi ini maka masyarakat Kota Ambon dapat mengikuti perkembangan yang terjadi Kota Ambon.

c. Pelayanan melalui SIMANTAP

Pelayanan publik merupakan pelayanan yang menjadi sorotan utama dari pemerintah karena masyarakat menuntut dari pemerintah untuk melakukan pelayanan prima, transparan dan cepat, untuk itu Pemerintah Kota Ambon menyediakan Pelayanan SIMANTAP untuk melaksanakan pelayanan yang prima, transparan dan cepat kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa puas dalam menyelesaikan pelayanan.

Pelayanan yang tersedia pada Pelayanan SIMANTAP berupa pelayanan perijinan SITU, SIUP, TDP, Ijin Trayek, IMB dan izin Gangguan.

d. Pelayanan melalui Data Pemberdayaan

Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon menyediakan pelayanan Data Pemberdayaan, dalam hal ini dalam Data Pemberdayaan tersedia data-data pemberdayaan dari OPD pemberdayaan secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memperoleh data-data pemberdayaan dengan cepat dan akurat.

e. Pelayanan Infrastruktur Jaringan

Dengan berkembangnya teknologi informasi yang begitu pesat, maka informasi dapat diperoleh dengan cepat melalui internet dan informasi tersebut sangat dibutuhkan oleh pegawai lingkup Pemerintah Kota Ambon dan masyarakat Kota Ambon, untuk itu Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian menyediakan layanan internet pada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di dalam dan luar Balai Kota dan area-area publik yaitu di empatkecamatan (KecamatanNusaniwe, Sirimau, Teluk Ambon, Baguala, tribun VIP lapanganmerdeka, area KONI Kota Ambon, taman Pattimura, taman patung leimena, taman perumahan, parkirana balaikota, taman karang panjang, pusat kuliner tapal kuda, dermag aamahusu, taman I ambon, pantai wainitu.

f. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Pemerintah Kota Ambon memiliki beberapa kanal pengaduan, yaitu SP4N-LAPOR, Whattapp (08114706999), FaceBook (Tabea_AMQ), Omni Chanel, WAJAR (Wali Kota Jumpa Rakyat), Instagram (Tabea_Amq), Live Chat di semua Web Pemerintah Kota Ambon, dan Box Surat. Untuk mengikut sertakan masyarakat dalam menunjang pembangunan Pemerintah Kota Ambon maka melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian menyediakan layanan pengaduan masyarakat dengan cara menyediakan layanan SP4N-lapor yang dapat digunakan masyarakat dan pegawai untuk menyampaikan informasi, aspirasi dan pengaduan. SP4N-lapor dikelola oleh 5 lembaga dan kementerian, yaitu Kemendagri, KemenPANRB, StafPresiaden, KemenKominfo, dan Ombudsman.

g. Pelayanan Videotron

Untuk memberikan informasi tentang pendapatan daerah lewat pembayaran pajak dan retribusi pada dinas pendapatan daerah, maka melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian telah melakukan pelayanan vidiotron untuk dapat menampilkan besarnya jumlah pendapatan per bulan yang dapat dilihat oleh masyarakat.

h. Pelayanan Pajak Online

Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pendapatan dan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon telah mengembangkan pelayanan pajak online dengan membuat aplikasi pajak online dan bekerjasama dengan PT. Bank Maluku Cabang Ambon yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membayar pajak secara online pada ATM Bank Maluku Cabang Ambon.

i. Pelayanan PPID

PPID Kota Ambon dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan walikota Ambon Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kota Ambon yang kemudian diubah melalui SK Walikota Ambon Nomor 227 Tahun 2018 sebagai konsekuensi dari perubahan nomenklatur organisasi pemerintahan daerah. Meskipun terdapat beberapa persoalan teknis, namun PPID Kota Ambon masih melakukan fungsinya secara baik. Hal ini tercermin dari beberapa hal, antara lain: Tersedianya data awal/ profil OPD pada <http://ppid.ambon.go.id/> dan website ambon.go.id; Melayani pemohon informasi dengan standar pelayanan minimal; Melayani masalah pemohon informasi sesuai prosedur bersama PPID pembantu terkait permintaan data informasi; Semua jenis pelayanan dilakukan dengan baik secara lisan maupun tertulis.

j. Data Simdatik

Simdatik (Sistem Informasi Data Statistik) adalah sistem informasi penginputan, pengolahan dan publikasi data statistic Pemerintah Kota Ambon. Data yang diinput bersumber dari seluruh OPD di dalam lingkup Pemerintah Kota Ambon, kemudian diolah dalam bentuk informasi narasi, tabel, maupun grafik dan publikasi. Setiap tahun selalu dilakukan pemutakhiran data. Untuk datanya bias diakses memlaui link simdatik.ambon.go.id.

k. Pelayanan Publikasi

Dengan tersedianya media publikasi seperti Website Pemerintah daerah ambon.go.id, Media Center, Majalah TABEA, Media Sosial Diskominfo Kota Ambon (facebook, instagram, twitter, youtube, tiktok) serta media organisasi seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Pejabat Pengelola Informasi Daerah PPID, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon diharapkan mampu memenuhi tuntutan masyarakat akan informasi yang lebih cepat dan terbuka serta diharapkan mampu menciptakan kemitraan dengan insan pers dan lembaga masyarakat lainnya sehingga terjalin komunikasi dua arah yang lebih komunikatif.

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.1.1 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Ambon adalah “Meningkatkan penyelenggaraan komunikasi dan penyediaan informasi dengan pemanfaatan Teknologi Informasi menuju Ambon Smart City”

3.1.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Adapun sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Ambon adalah :

1. Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan keterbukaan informasi public dalam penyelenggaraan pemeintah.
2. Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah.
3. Meningkatnya ketersediaan data pada portal satu data daerah.

3.1.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Ambon sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan keterbukaan informasi public dalam penyelenggaraan pemerintah	Persentase pembentukan KIM ditingkat desa/kelurahan	
		Persentase media masa yang	Jumlah kerjasa pemerintah kota

		mempublikasikan informasi pemerintah daerah	ambon dengan media cetak dan elektronik
		Persentase pemanfaatan media social oleh OPD	Jumlah media social yang dimafaatakn untuk mempublikasikan kegiatan pemerintah kota ambon
		Persentase ketersediaan jaringan intra pemerintah	Jumlah Perangkat daerah yang menggunakan layanan wifi
		Persentase integrasi aplikasi layanan public dan layanan aparatur pemerintah	Jumlah OPD yang memiliki website dan aplikasi
2.	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Persentase penyediaan sertifikat elektronik	Jumlah OPD yang menggunakan sertifikat elektronik
3.	Meningkatnya ketersediaan data	Persentase ketersediaan data	Data prioritas statistic sektoral

	pada portal satu data daerah	pada portal satu data daerah	dan IKK (indicator kinerja kunci) dan IKU (indicator kinerja utama) berdasarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
--	------------------------------	------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.4 Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Ambon pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1. Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.3.2. Penyediaan Bahan Logistik

1.3.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.3.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.4.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.4.2. Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor

1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.5.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

2.1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.1.2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

2.2. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.2.1. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah

2.2.2. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

2.2.3. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

2.2.4. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

2.2.5. Pengelolaan Government Chief Information Officer

III. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

3.1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten/Kota

3.1.1. Koordinasi dan Sinkronasi Pengumpulan, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

4.1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

4.1.1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Adapun Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Ambon Tahun 2023 dalam Tabel dibawah ini

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PRIORITA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja		Pa	
			Keluaran Kegiatan	Target/ Volume	RKPD 2023	Al

1				2	3	4	5	6	
2				UNSUR KEWILAYAHAN					
2	16			URUSAN PEMERINTAH BIDANG INFORMATIKA					
2	16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4,067,860,491	3,9
2	16	01	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10,000,000	
2	16	01	2.0 2 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumentasi RKPD	Kota Ambon	Dokumen RKA- SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA- SKPD	1 dokumen 1 laporan	2,500,000	
2	16	01	2.0 1 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Ambon	tersedia dokumen laporan perencanaan	3 dokumen	7,500,000	
2	16	01	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,307,354,415	2,7
2	16	01	2.0 2 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Ambon	tersedia gaji asn	25 ASN	2,303,354,415	2,7
				05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Ambon	Terlaksana rekonsiliasi laporan barang milik daerah	2 laporan	2,000,000	
2	16	01	2.0 3 02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Kota Ambon	tersedianya dokumen laporan	2 laporan	2,000,000	

				Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		keuangan				
2	16	01	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah					637,076,168	5.
2	16	01	2.0 6	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Ambon	Tersedianya komponen instalasi listrik kantor	1 paket		8,000,000	
2	16	01	2.0 6	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Ambon	tersedia peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket		400,000,000	2
2	16	01	2.0 6	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Ambon	tersedia bahan logistik kantor	3 paket		30,450,000	
2	16	01	2.0 6	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Ambon	tersedia barang cetak penggandaan	2 paket		18,000,000	
2	16	01	2.0 6	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Ambon	terlaksana rapat koordinasi luar daerah	10 kali		180,626,168	2
2	16	01	2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,033,429,908	4
2	16	01	2.0 8	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Ambon	tersedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	2 jenis		30,000,000	
2	16	01	2.0 8	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Ambon	tersedia jasa layanan umum	2 jenis		1,003,429,908	4
2	16	01	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					80,000,000	1.
2	16	01	2.0 9	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Kota Ambon	Tersedia biaya pemeliharaan	3 mobil		65,000,000	1

				atau Kendaraan Dinas Jabatan					
2	16	01	2.0 9 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Ambon	Tersedianya biaya pemeliharaan	23 item	15,000,000	
2	16	02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				3,823,257,794	2,7
2	16	02	2.0 1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				3,823,257,794	2,7
2	16	02	2.0 1 06	Pelayanan Informasi Publik	Kota Ambon	Terlaksananya publikasi pemerintah kota ambon	1 Paket	484,845,794	7
2	16	02	2.0 1 07	Layanan Hubungan Media	Kota Ambon	Terlaksananya Kerja sama dengan media cetak elektronik	1 Paket	775,000,000	1,6
2	16	02	2.0 2 08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kota Ambon	Terlaksananya kemitraan dengan pemangku kepentingan	30 media	1,800,000,000	
2	16	02	2.0 1 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kota Ambon	Terlaksananya pembentukan KIM di keluarah/desa/negeri	1 Paket	110,456,000	1
				Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kota Ambon	Terlaksananya penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	1 dokumen	122,956,000	

2	16	02	2.0 1	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kota Ambon	Terlaksananya dokumentasi kegiatan pemerintah kota ambon	1 Paket	340,000,000	2
2	16	02	2.0 1	13	Penyediaan /Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Ambon	Terlaksananya dokumentasi kegiatan pemerintah kota ambon	1 Paket	190,000,000	
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				4,866,406,926	3,8
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota				2,798,321,880	2,8
2	16	03	2.01 02		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Ambon	Terlaksana penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain	1Dokumen	68,220,000	
2	16	03	2.01 03		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah	Kota Ambon	Tersedianya Jaringan internet dan cctv	64 OPD dan 39 titik	2,730,101,880	2,8
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2,068,085,046	1,0
2	16	03	2.02 01		Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Ambon	Terlaksananya penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	1 paket	139,065,420	
2	16	03	2.02 03		Pengelolaan Pusat Data	Kota	Terlaksananya sewa	1 paket	100,000,000	2

				Pemerintah Daerah	Ambon	cloud dan pemeliharaan server			
2	16	03	2.02	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kota Ambon	Terlaksananya jasa call center dan mobile device	2 dokumen	444,000,000	2
2	16	03	2.02	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik		TerTersedianya aplikasi berbasis		585,000,000	
2	16	03	2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Ambon	Terlaksananya inovasi dan masterplane smart city	2 dokumen	75,000,000	
2	16	03	2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Ambon	Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi	1 dokumen	540,019,626	4
2	16	03	2.02	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kota Ambon	Terlaksananya pengelolaan GCIO	1 dokumen	110,000,000	
2	16	03	2.02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kota Ambon	Terlaksananya evaluasi SPBE dan FGD	1 dokumen	75,000,000	
2	20	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				380,000,000	
2	20	02	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota				380,000,000	4
2	20	02	2.01	01 Koordinasi dan Sinkronasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan	Kota Ambon	Terlaksananya sinkronasi data statistik sektoral	1 dokumen	100,000,000	1

					Diseminasi Data Statistik Sektoral					
2	20	02	2.01	03	Membangaun Meta Data Statistik Sektoral	Kota Ambon	Terbangunnya meta data statistik sektoral	20 dokumen	20,000,000	
2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kota Ambon	Terlaksanyanya peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	1 dokumen	55,000,000	
2	20	02	2.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kota Ambon	Terlaksanyanya otorisasi statistik sektoral di daerah	1 dokumen	205,000,000	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				510,000,000	1:
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				460,000,000	1:
				01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Ambon	Ditetapkannya kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring sandi pemerintah daerah kabupaten/kota	1 dokumen	115,000,000	
2	21	2	2.01							

2	21	2	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Ambon	Terlaksananya analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	1 laporan	75,000,000	
2	21	2	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Dearah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Ambon	Terlaksananya keamanan informasi berbasis elektronik dan non elektronik	1 laporan	150,000,000	1
2	21	2	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Ambon	Tersedianya layanan keamanan informasi untuk perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota	1 laporan	120,000,000	
2	21	2	2.02		Penetapan Pola Hubungan Sandi Anter Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				50,000,000	
2	21	2	2.02	01	Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Ambon	Terlaksananya kOperasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	50,000,000	
TOTAL									13,647,525,211	10,7

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN KOTA AMBON

DRS. JOY R. ADRIAANSZ, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770320 199511 1 001

BAB IV PENUTUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Ambon Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Ambon yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ambon Tahun 2023-2026.

Keberhasilan Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Ambon dalam mencapai target visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan segenap staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Ambon.

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2023 ini dapat terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Ambon.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN KOTA AMBON

DRS. JOY R. ADRIAANSZ, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770320 199511 1 001

